



Pemkot Yogya Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

■ Yulianingsih

Dinkes terus meningkatkan layanan kesehatan di semua puskesmas.

YOGYAKARTA -- Berbagai penghargaan di bidang kesehatan telah diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam dua tahun terakhir. Namun hal tersebut tidak membuat pemkot setempat berpangku tangan. Berbagai kebijakan dan program terus digulirkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat setempat.

Tahun ini, Pemkot Yogyakarta telah meningkatkan layanan kesehatan yang berbasis puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan di Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mengembangkan beberapa program untuk menekan angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan bayi di kota tersebut.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Vita Yulia, mengatakan dibanding kota lain, angka kematian ibu dan bayi di Kota Yogyakarta sangat rendah. Namun, angka tersebut masih saja ada di kota ini. "Kita berharap tidak ada kasus kematian ibu dan bayi di kota ini karena melahirkan," ujarnya, Selasa (11/8).

Menurutnya, angka kematian ibu melahirkan di 2013 mencapai sembilan kasus dan kematian bayi 25 kasus. Tahun ini, angka tersebut hingga Juli 2014 ada satu kasus kematian ibu melahirkan dan 20 kasus kematian bayi. "Ini bagi kami masih cukup tinggi," katanya.

Setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh, ternyata salah satu penyebab

tingginya angka itu karena terlambatnya keluarga termasuk ibu yang melahirkan dalam menentukan akses layanan kesehatan di Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian itu, 51 persen kasus kematian ibu dan bayi akibat faktor keterlambatan pengambilan keputusan tadi.

Untuk itulah, tahun ini Dinkes Kota Yogyakarta terus meningkatkan layanan kesehatan di semua puskesmas. Jumlah puskesmas di Kota Yogyakarta sebanyak 18 unit ditambah sembilan unit puskesmas pembantu. Jumlah ini sangat mencukupi untuk melayani kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 32 kilometer persegi.

Salah satu program layanan yang dikembangkan di puskesmas adalah Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) untuk deteksi dini kasus HIV-AIDS. Melalui layanan ini, puskesmas harus melakukan *screening* terhadap ibu hamil dan bayinya untuk deteksi dini kasus tersebut.

Ada tujuh puskesmas yang tahun ini sudah bisa menyediakan LKB. Ketujuh puskesmas adalah Puskesmas Gedongtengen, Umbulharjo I, Mergangsan, Mantrijiro, Tegalrejo, Wirobrajan, dan Gondokusuman I.

Pada 2015, ditargetkan seluruh puskesmas di Kota Yogyakarta sudah bisa melakukan layanan tersebut. "Kita targetkan seluruh ibu hamil bisa di-*screening*, karena kasus HIV-AIDS terus meningkat dari tahun ke tahun dan ibu rumah tangga termasuk bayi menjadi kelompok yang lemah dan rentan terhadap penularan virus ini. Karenanya deteksi dini perlu dilakukan agar penanganan bisa dilakukan secepatnya," kata Vita.

Selain LKB, tahun ini pihaknya juga mengembangkan puskesmas sebagai rawat inap persalinan. Ada tiga puskesmas yang bisa melayani rawat inap per-

salinan, yaitu Puskesmas Tegalrejo, Jatis, dan Mergangsan.

Tiga puskesmas merupakan puskesmas yang masuk kategori puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED). Sedangkan puskesmas yang non PONED di Yogyakarta ada 15 unit.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Kuswinarto, mengatakan ibu hamil yang memeriksakan diri di puskesmas sudah bisa dipilah sejak awal. Jika ibu hamil ini sehat dan diperkirakan melahirkan normal maka bisa dilayani di puskesmas PONED saat persalinan.

Namun, lanjut dia, jika dalam perjalanan ditemukan ada gangguan kesehatan maka akan dirujuk ke rumah sakit PONEK yaitu layanan komprehensif.

"Ada empat rumah sakit di Kota Yogyakarta yang menjadi rujukan untuk kasus persalinan akibat gangguan kesehatan dan lainnya, yaitu RS PKU Muhammadiyah, Bethesda, Pantitrah, dan RS Jogja," katanya.

"Dengan pemilahan sejak dini ibu hamil ini, diharapkan layanan persalinan bagi para ibu melahirkan bisa dilakukan secara optimal dan penanganan medis yang diberikan juga tepat," ujar dia.

Buku KIA

Pada bagian lain, Vita menambahkan, tahun ini Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti juga menerbitkan peraturan wali kota (perwal) baru untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayinya melalui sarana buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Perwal No 34 Tahun 2014 tentang pemanfaatan KIA diterbitkan karena selama hampir 10 tahun KIA belum dimanfaatkan secara optimal di Yogyakarta. "Sebenarnya sudah ada Kepmenkes 284/2004

1 Negatif Amat Segera Untuk Ditanggapi

tentang KIA. Namun sudah sepuluh tahun ternyata cakupan KIA di Kota Yogyakarta baru 70 persen dari jumlah ibu hamil di kota ini," kata Vita.

Padahal, sambung Vita, buku KIA merupakan kunci dasar untuk mengetahui riwayat kesehatan ibu hamil dan bayinya. Buku KIA juga bisa digunakan untuk media edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan bayinya. Karenanya, melalui perwal itu pihaknya menargetkan cakupan buku KIA di Yogyakarta bisa mencapai 100 persen tahun ini.

Melalui perwal ini, papar dia, semua layanan kesehatan bagi rumah sakit maupun puskesmas diwajibkan memberikan buku KIA pada ibu hamil yang memeriksakan diri ke layanan kesehatan tersebut. Dinkes menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) dan Dinas Pendidikan setempat untuk itu.

Bagi ibu yang mengurus akte lahir anaknya di Dindikcapil diwajibkan menyertakan buku KIA tersebut. Sedangkan ibu yang akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah dasar di Kota Yogyakarta juga diwajibkan menyertakan buku KIA. "Ini penting karena di buku KIA itu juga ada riwayat imunisasi bayi dan riwayat penyakitnya jika ada," katanya.

Buku ini juga penting sebagai pengantar layanan kesehatan di kota lain jika ibu dan bayinya bepergian. Karena dokter yang menangani bisa melihat riwayat kesehatan pasien melalui buku KIA. Buku KIA bisa diakses ibu hamil di setiap puskesmas atau di kader-kader pendamping kesehatan yang ada di setiap RW di Kota Yogyakarta.

Sementara untuk peningkatan

layanan kesehatan seiring pemberlakuan BPJS, Dinkes Kota Yogyakarta akan mengembangkan layanan kesehatan bagi masyarakat di puskesmas pada pagi-siang dan siang-sore. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan masyarakat akan dilayani hingga sore di puskesmas. Untuk itu pihaknya terus menambah jumlah tenaga medis di puskesmas.

Kabid Regulasi dan Pengembangan SDM Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta Emma Rahmi Ariyani, mengatakan berdasarkan pemetaan, SDM bidang kesehatan di semua puskesmas di Kota Yogyakarta baru tercukupi 60 persen dari total kebutuhan. Kebutuhan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat di semua puskesmas di Kota Yogyakarta sebanyak 490 orang.

"Kita masih kurang 63 orang, sudah kita ajukan untuk penerimaan CPNS tahun ini, namun kita baru diberi kuota untuk CPNS dokter sebanyak 10 orang," ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dinkes melakukan kebijakan kontrak kerja bagi tenaga kesehatan termasuk manajemen kesehatan di setiap puskesmas di Kota Yogyakarta. Tahun ini, Dinkes juga tengah membangun rumah sakit (RS) pratama. RS ini dibangun dengan pengembangan puskesmas Mergangsan.

RS ditargetkan mulai beroperasi pada 2016 mendatang dan menjadi RS type D dengan layanan awal 69 kamar rawat inap. "Untuk persiapan pendirian RS ini kita menyekolahkan dokter puskesmas untuk mengambil spesialisasi, seperti dokter spesialis anak, kandungan, dan penyakit dalam," ujarnya. ■ **ed:** yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005